



## Korelasi antara *tax ratio* dan ketimpangan pendapatan per regional: Bukti empiris dari Indonesia

Ayu Fatmawati<sup>1</sup>, Faradilla Kusumaningrum<sup>2</sup>, Puji Wahono<sup>3</sup>, Indra Pahala<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Jakarta

email: <sup>1</sup>[Ayufmwf20@gmail.com](mailto:Ayufmwf20@gmail.com), <sup>2</sup>[Faradilla.Kusuma@gmail.com](mailto:Faradilla.Kusuma@gmail.com), <sup>3</sup>[wahono@unj.ac.id](mailto:wahono@unj.ac.id), <sup>4</sup>[Indrapahala@unj.ac.id](mailto:Indrapahala@unj.ac.id)

### Info Artikel :

Diterima :

15 Mei 2025

Disetujui :

5 Juni 2025

Dipublikasikan :

25 Juni 2025

### ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan merupakan tantangan besar dalam pembangunan Indonesia, khususnya di provinsi kaya sumber daya yang memiliki kontribusi pajak rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara *tax ratio* sebagai indikator kemampuan fiskal daerah dan Gini ratio sebagai ukuran ketimpangan pendapatan. Menggunakan data panel dari 34 provinsi selama periode 2020 hingga 2023, pendekatan kuantitatif asosiatif digunakan dengan metode analisis statistik deskriptif, korelasi Pearson, dan regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang kuat dan signifikan antara *tax ratio* dan Gini ratio, yang berarti bahwa semakin tinggi kontribusi pajak terhadap PDRB suatu provinsi, semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatannya. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sistem perpajakan yang efektif berperan dalam mendistribusikan kesejahteraan secara lebih merata di tingkat regional. Temuan ini juga mendorong pentingnya reformasi perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik ekonomi daerah untuk mendukung pemerataan pembangunan.

**Kata kunci:** *Tax ratio*, *Gini Ratio*, *Ketimpangan Pendapatan*, *Fiskal Daerah*, *Regresi Panel*

### ABSTRACT

Income inequality remains a major challenge in Indonesia's development, especially in resource-rich provinces with low tax contributions. This study aims to examine the relationship between the *tax ratio* as an indicator of regional fiscal capacity and the Gini ratio as a measure of income inequality. Using panel data from 34 provinces during the period of 2020 to 2023, a causal associative quantitative approach is applied through descriptive statistics, Pearson correlation, and panel regression analysis. The findings reveal a strong and significant negative relationship between the *tax ratio* and the Gini ratio, indicating that provinces with higher tax contributions relative to their GRDP tend to have lower income inequality. This study provides empirical evidence that an effective tax system plays a vital role in promoting equitable regional welfare distribution. These results support the need for tax policy reforms that are adapted to the unique economic characteristics of each region to promote more inclusive and balanced development.

**Keywords:** *Tax ratio*, *Gini Ratio*, *Income Inequality*, *Regional Fiscal*, *Panel Regression*



©2025 Ayu Fatmawati, Faradilla Kusumaningrum, Puji Wahono, Indra Pahala. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

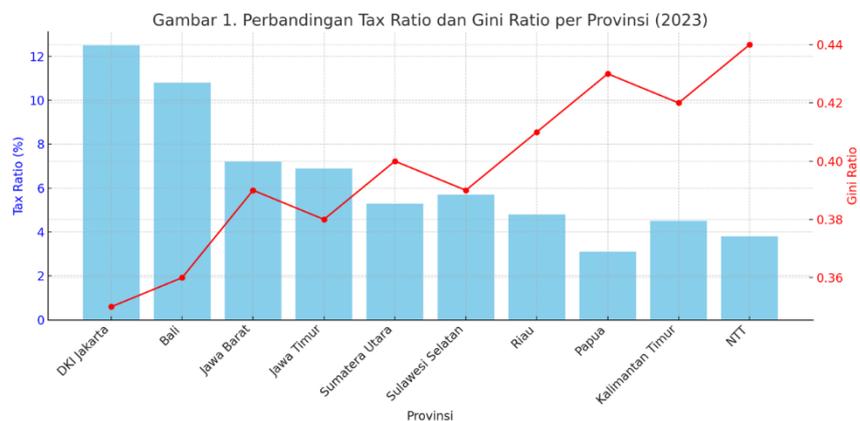
Ketimpangan pendapatan merupakan tantangan fundamental dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Pemerataan hasil pembangunan antar daerah menjadi prioritas utama dalam berbagai dokumen perencanaan strategis nasional, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Salah satu instrumen utama yang dapat dimanfaatkan negara untuk meredam ketimpangan adalah sistem perpajakan, khususnya melalui efisiensi pengumpulan pajak yang tercermin dalam rasio pajak (*tax ratio*). Rasio pajak menggambarkan proporsi penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB), yang menjadi indikator kapabilitas fiskal suatu daerah atau negara.

Dengan menggunakan data regional Indonesia, penelitian tentang korelasi antara *tax ratio* dan ketimpangan pendapatan dapat menilai validitas empiris dari temuan OECD di tingkat subnasional. Selain itu, *tax buoyancy* dapat digunakan sebagai variabel antara (*intermediate variable*) untuk memahami apakah pertumbuhan ekonomi suatu daerah benar-benar ditransformasikan menjadi

kapasitas fiskal yang lebih besar, yang pada akhirnya akan berdampak pada ketimpangan pendapatan. Ini sekaligus dapat menguji apakah ketimpangan pendapatan merupakan cerminan dari kegagalan sistem perpajakan dalam merespons dinamika ekonomi lokal (OECD, 2024).

Di tengah upaya reformasi perpajakan dan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi, rasio pajak Indonesia masih stagnan pada kisaran 10–11% dari PDB, tergolong rendah dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya. Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa *Gini Ratio* sebagai indikator ketimpangan pendapatan masih berkisar di angka 0,38–0,41 pada periode 2020–2023, dengan ketimpangan yang relatif tinggi di wilayah-wilayah kaya sumber daya namun minim kontribusi pajak.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: *Apakah daerah dengan tax ratio tinggi cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah?* Jika ya, maka efektivitas sistem perpajakan dalam mendistribusikan kesejahteraan secara adil dapat dibuktikan secara kuantitatif. Untuk memberikan konteks empiris awal, berikut ditampilkan visualisasi dua indikator utama yang menjadi fokus penelitian ini: *Tax ratio* (Direktorat Jenderal Pajak, 2023) dan *Gini Ratio* Provinsi dan Daerah (BPS RI, 2024) :



**Gambar 1. Perbandingan *Tax ratio* dan *Gini Ratio* per Provinsi (2023)**

Dari visualisasi awal terlihat bahwa provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta dan Bali memiliki *tax ratio* tinggi serta *Gini Ratio* relatif rendah. Sebaliknya, provinsi kaya sumber daya alam seperti Papua dan Kalimantan Utara menunjukkan *tax ratio* rendah dan *Gini Ratio* yang lebih tinggi, mengindikasikan adanya potensi relasi negatif antara kemampuan fiskal dan ketimpangan pendapatan. Namun, untuk memastikan hubungan tersebut bersifat konsisten dan signifikan secara statistik, diperlukan analisis lebih lanjut secara kuantitatif, mengingat relasi ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor struktural dan kelembagaan.

Penelitian mengenai hubungan antara sistem perpajakan dan ketimpangan pendapatan telah dilakukan secara luas, terutama dalam konteks negara maju. Zucman (2015) menyoroti bahwa pajak progresif dapat menjadi alat efektif dalam meredam konsentrasi kekayaan. Tanzi (2000) menyatakan bahwa negara berkembang sering kali menghadapi tantangan dalam optimalisasi *tax ratio* akibat sektor informal yang besar dan kepatuhan pajak yang rendah.

Di Indonesia, studi-studi terdahulu seperti yang dilakukan hanya melihat hubungan antara *tax ratio* nasional dengan ketimpangan pendapatan nasional secara agregat. Studi tersebut belum mengeksplorasi variasi spasial dan dinamika hubungan pada level regional (provinsi), padahal kebijakan fiskal bersifat multilevel dan implementasinya sangat tergantung pada kapasitas daerah. Hesty Aisyah et al. (2023) menyatakan bahwa Di negara-negara berkembang, permasalahan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis sangat mempengaruhi masalah kemiskinan. Salah satu upaya untuk menangani masalah kemiskinan adalah dengan cara meminimalisir ketimpangan pendapatan.

Beberapa kebijakan pemerintah telah berfokus pada redistribusi pendapatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendukung keluarga berpenghasilan rendah. Peningkatan ketimpangan pendapatan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan yang tinggi sangat penting karena mengurangi manfaat pertumbuhan ekonomi

bagi masyarakat miskin. Meningkatnya ketimpangan pendapatan dan meluasnya kemiskinan merupakan isu utama dalam proses pembangunan. Nurfadila & Intan (2023) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan yang masih dialami oleh negara Indonesia. Perlu dilakukan suatu upaya untuk menangani ketimpangan pendapatan dengan menurunkan nilai indeks gini ratio. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meminimalisir faktor penyebab tingginya nilai indeks gini ratio.

Meskipun isu ketimpangan pendapatan telah menjadi perhatian dalam berbagai studi ekonomi, masih sangat terbatas penelitian yang secara eksplisit mengkaji hubungan antara rasio pajak dan ketimpangan pendapatan dengan menggunakan pendekatan data panel lintas tahun di tingkat provinsi di Indonesia. Mayoritas studi terdahulu cenderung menggunakan data agregat nasional atau pendekatan cross-section yang tidak mampu menangkap dinamika temporal dan variasi spasial antarwilayah. Padahal, pendekatan data panel memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu serta perbedaan karakteristik antarprovinsi, termasuk efek tetap yang mungkin melekat pada tiap wilayah (Susilo et al., 2023).

Kekosongan inilah yang menjadi celah penting dan justifikasi ilmiah dari penelitian ini. Dalam konteks itu, studi ini berupaya memberikan kontribusi kebaruan yang substansial, baik dalam hal pendekatan metodologis, integrasi sumber data, maupun relevansi kebijakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan unit analisis daerah, dengan cakupan seluruh provinsi di Indonesia, sehingga memungkinkan pengamatan terhadap pola-pola spasial dalam distribusi keadilan fiskal dan ketimpangan ekonomi (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2025). Dengan memadukan data resmi dari dua sumber utama yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk penerimaan pajak per provinsi dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Gini Ratio penelitian ini tidak hanya meningkatkan validitas temuan empiris, tetapi juga memperkuat keandalan dalam menyusun rekomendasi kebijakan.

Lebih jauh, penelitian ini memiliki kedekatan langsung dengan agenda reformasi perpajakan nasional. Selama ini, diskursus mengenai reformasi pajak seringkali berpusat pada peningkatan rasio penerimaan pajak secara umum, tanpa melihat bagaimana kebijakan tersebut berimplikasi terhadap keadilan sosial, terutama dalam konteks ketimpangan antarwilayah. Dengan membuktikan atau menolak hipotesis mengenai korelasi negatif antara *tax ratio* dan tingkat ketimpangan pendapatan, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi fiskal, tetapi juga memberikan landasan empiris yang dapat dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan untuk merancang instrumen fiskal yang lebih adil dan efektif secara distribusional di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan gap teoritik yang telah dipaparkan, pertanyaan sentral yang menjadi fokus penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara *tax ratio* dan tingkat ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi selama periode 2020 hingga 2023. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan empiris antara *tax ratio* dan Gini Ratio antarprovinsi di Indonesia, mengidentifikasi pola ketimpangan regional yang terjadi, serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas kontribusi fiskal mampu memainkan peran dalam mendukung agenda pemerataan ekonomi. Pada akhirnya, studi ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan kontekstual dalam mendukung reformasi perpajakan yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara rasio pajak (*tax ratio*) dan ketimpangan pendapatan (*Gini ratio*) di tingkat provinsi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data panel dari 34 provinsi selama periode 2020–2023.

Sumber data diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk data penerimaan pajak provinsi, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta Gini Ratio. Teknik penentuan informan tidak diterapkan karena data bersifat kuantitatif sekunder dan tidak melibatkan responden langsung.

Instrumen penelitian berupa tabel data yang dikonstruksi dari publikasi resmi DJP dan BPS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran arsip statistik online dari lembaga-lembaga terkait.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama: analisis statistik deskriptif untuk melihat tren dan karakteristik data, analisis korelasi Pearson untuk menguji kekuatan dan arah hubungan

antarvariabel, serta analisis regresi panel data untuk mengestimasi pengaruh *tax ratio* terhadap Gini ratio. Pemilihan model regresi dilakukan melalui uji Chow dan Hausman (Ghozali, 2001), serta dilengkapi dengan uji asumsi klasik dan uji signifikansi (uji F, uji t, R-squared). Analisis utama dilakukan menggunakan metode regresi panel dengan tiga pendekatan:

1. *Common Effect Model (CEM)*
2. *Fixed Effect Model (FEM)*
3. *Random Effect Model (REM)*

Model utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$GINI_{it} = \alpha + \beta_1 Tax Ratio_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 Urban_{it} + \beta_4 UMKM_{it} + \mu_i + \epsilon_{it} \quad (1)$$

Sementara itu, uji signifikansi yang dilakukan di antaranya adalah uji F simultan untuk keseluruhan model, uji t parsial untuk masing-masing koefisien, R-squared untuk melihat besarnya variasi Gini Ratio yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis awal dilakukan dengan mengamati karakteristik umum data menggunakan statistik deskriptif terhadap dua variabel utama, yaitu *tax ratio* dan *Gini ratio*. Data diambil dari 34 provinsi di Indonesia untuk tahun 2023. Hasil rekapitulasi statistik ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel *Tax ratio* dan *Gini Ratio* Tahun 2023**

Statistik	<i>Tax ratio</i> (%)	<i>Gini Ratio</i>
Rata-rata	6,46	0,397
Simpangan Baku	3,04	0,029
Minimum	3,10	0,350
Kuartil 1 (Q1)	4,58	0,383
Median (Q2)	5,50	0,395
Kuartil 3 (Q3)	7,13	0,418
Maksimum	12,50	0,440

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat variasi cukup besar dalam *tax ratio*, mulai dari hanya 3,1% (Papua) hingga 12,5% (DKI Jakarta). Variasi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam kontribusi fiskal antarwilayah. Sementara itu, *Gini ratio* menunjukkan ketimpangan pendapatan yang tergolong sedang hingga tinggi, dengan nilai berkisar antara 0,35 hingga 0,44. Rata-rata nasional sebesar 0,397 mengindikasikan bahwa pemerataan belum optimal secara nasional, terutama di provinsi yang kaya sumber daya tetapi kontribusi fiskalnya rendah.

Untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara *tax ratio* dan *Gini ratio*, dilakukan uji korelasi Pearson. Hasil pengujian menunjukkan koefisien korelasi sebesar  $-0,94$  dengan nilai signifikansi  $p = 0,000051$ . Ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat kuat dan signifikan secara statistik antara kedua variabel.

Secara substantif, hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi *tax ratio* suatu provinsi yakni kontribusi pajak terhadap PDRB, semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan di provinsi tersebut. Hasil ini mendukung hipotesis awal dan memberikan indikasi awal bahwa kebijakan fiskal memiliki peran redistributif yang signifikan dalam konteks pembangunan wilayah.

Selanjutnya dilakukan regresi linier sederhana untuk melihat pengaruh *tax ratio* terhadap *Gini ratio* secara lebih terukur. Hasil ringkasan regresi panel ditampilkan dalam Tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Hasil Regresi Panel Data**

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Stat	p-Value	95% Confidence Interval
Intercept	0.4552	0.0081	55.92	0.000	[0.436, 0.474]
<i>Tax ratio</i> (%)	-0.0090	0.0011	-7.83	0.000	[-0.012, -0.006]

Nilai R-squared sebesar 0,885 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 88,5% variasi *Gini ratio* antarprovinsi yang diamati. Uji F simultan signifikan ( $p < 0,01$ ), begitu pula uji t parsial untuk variabel *tax ratio*, yang menunjukkan bahwa pengaruhnya signifikan secara statistik. Koefisien negatif sebesar  $-0,009$  mengandung makna bahwa setiap peningkatan 1% dalam *tax ratio*

akan menurunkan Gini ratio sebesar 0,009 poin. Hasil ini memperkuat klaim bahwa peningkatan efektivitas fiskal melalui pajak berkorelasi kuat dengan pengurangan ketimpangan.

Hasil empiris dalam penelitian ini mendukung teori ekonomi publik yang dikemukakan oleh Musgrave & Musgrave (1989), yang menyatakan bahwa sistem pajak yang adil dan progresif dapat menjadi alat utama redistribusi pendapatan. Efektivitas pajak sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi juga selaras dengan temuan Zucman (2015), yang menunjukkan bahwa negara dengan sistem pajak yang kuat cenderung memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih rendah.

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan fiskal dan spasial sangat kental. Provinsi seperti DKI Jakarta dan Bali menunjukkan rasio pajak tinggi dengan ketimpangan yang lebih rendah, sementara daerah seperti Papua dan Kalimantan Utara menunjukkan sebaliknya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah, kepatuhan pajak, tingkat informalitas, dan kapasitas administrasi fiskal daerah sangat mempengaruhi efisiensi sistem perpajakan dan hasil redistributifnya.

Namun demikian, hubungan antara *tax ratio* dan ketimpangan pendapatan tidak bersifat deterministik. Misalnya, ada provinsi dengan *tax ratio* menengah tetapi tetap memiliki Gini ratio tinggi, yang bisa disebabkan oleh ketergantungan pada sektor informal, dominasi elite ekonomi lokal, atau ketimpangan spasial dalam provinsi itu sendiri. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pengayaan model analisis dengan menyertakan variabel kontrol seperti rasio kemiskinan, jumlah UMKM formal, serta indeks pembangunan manusia (IPM) untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan *tax ratio* daerah tidak hanya penting dalam konteks peningkatan pendapatan negara, tetapi juga berdampak nyata terhadap keadilan sosial dan pemerataan Pembangunan (Pattimau, 2024). Dengan demikian, reformasi pajak di Indonesia harus mempertimbangkan pendekatan berbasis wilayah (*place-based fiscal policy*), dengan memperkuat kapasitas perpajakan daerah serta memperluas basis pajak secara progresif dan adil.

Provinsi-provinsi dengan *tax ratio* rendah dan Gini ratio tinggi harus menjadi fokus kebijakan, baik dari sisi pembinaan administrasi fiskal maupun penguatan sistem ekonomi lokal. Penelitian ini juga mendorong pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan strategi pembangunan inklusif, yang tidak hanya mengandalkan transfer fiskal pusat, tetapi juga membangun kemandirian fiskal daerah.

### Diskusi dan Perbandingan dengan Studi Sebelumnya

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat kuat dan signifikan antara *tax ratio* dan *Gini ratio* di tingkat provinsi di Indonesia. Hal ini memperkuat hipotesis awal bahwa semakin tinggi kontribusi pajak suatu daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan yang dialaminya. Koefisien korelasi sebesar  $-0,94$  dan hasil regresi yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada *tax ratio* dapat menurunkan Gini ratio sebesar 0,009 poin, memberikan bukti empiris yang cukup kuat untuk menegaskan bahwa sistem perpajakan daerah memiliki efek yang nyata terhadap distribusi pendapatan yang lebih merata.

Temuan ini tidak hanya memperkaya literatur empiris dalam konteks fiskal regional Indonesia, tetapi juga sejalan dengan teori-teori klasik dalam ekonomi publik. Salah satu yang paling relevan adalah pandangan Musgrave dan Musgrave (1989) mengenai fungsi redistributif dari sistem pajak. Pajak tidak hanya dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran negara, tetapi juga untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui mekanisme transfer fiskal yang dirancang secara adil dan progresif. Dalam konteks global, Gabriel Zucman (2015) juga menekankan bahwa efektivitas fiskal sangat ditentukan oleh bagaimana hasil perpajakan digunakan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya selaras secara teoritis, tetapi juga memperkuat argumen bahwa pajak memiliki posisi strategis dalam mendorong pembangunan yang inklusif.

Meskipun hubungan negatif yang ditemukan antara *tax ratio* dan Gini ratio bersifat kuat secara statistik, perlu disadari bahwa hubungan ini tidak bersifat deterministik. Tidak semua provinsi dengan *tax ratio* rendah memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi, dan sebaliknya (Situmorang et al., 2025). Terdapat wilayah-wilayah yang menunjukkan anomali terhadap pola umum ini. Fenomena tersebut menandakan adanya kompleksitas struktural dalam konteks daerah, yang tidak sepenuhnya tercermin melalui indikator fiskal semata. Beberapa provinsi misalnya, memiliki basis ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam, seperti Kalimantan Timur dan Papua. Meskipun output ekonominya besar, distribusi nilai tambah seringkali tidak merata karena didominasi oleh aktivitas ekonomi ekstraktif yang padat modal namun minim distribusi pendapatan ke masyarakat lokal.

Selain itu, dominasi sektor informal di beberapa daerah, seperti Nusa Tenggara Timur dan Riau, dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak serta kegagalan sistem fiskal untuk menangkap potensi ekonomi yang sebenarnya (Pattimau, 2024). Di sisi lain, agregat fiskal suatu provinsi juga belum tentu mencerminkan ketimpangan di dalamnya. Ketimpangan spasial antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi dapat tersembunyi di balik data rata-rata, sehingga diperlukan pendekatan analitis yang lebih mendalam. Dengan latar belakang tersebut, hasil penelitian ini sebaiknya dibaca sebagai indikasi kuat atas adanya korelasi fiskal dan ketimpangan, tetapi tetap terbuka terhadap penjelasan alternatif dan perluasan cakupan variabel.

Temuan ini membawa implikasi penting dalam ranah kebijakan, terutama dalam konteks reformasi perpajakan nasional. Peningkatan *tax ratio* seharusnya tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai instrumen peningkatan penerimaan negara, melainkan sebagai bagian dari strategi besar keadilan sosial. Provinsi-provinsi dengan *tax ratio* yang rendah namun memiliki tingkat ketimpangan tinggi seharusnya menjadi perhatian utama dalam agenda reformasi pajak. Perbaikan sistem administrasi perpajakan daerah, perluasan basis pajak melalui legalisasi sektor informal, dan peningkatan kesadaran fiskal masyarakat lokal menjadi langkah-langkah konkret yang perlu diprioritaskan.

Lebih jauh lagi, pendekatan fiskal berbasis wilayah menjadi semakin relevan. Kebijakan pajak yang bersifat sentralistik cenderung mengabaikan variasi karakteristik ekonomi regional. Oleh karena itu, sinergi antara strategi pembangunan daerah dan desain sistem perpajakan menjadi keharusan dalam menciptakan efektivitas kebijakan yang tidak hanya efisien secara fiskal, tetapi juga adil secara sosial. Reformasi perpajakan yang adaptif terhadap realitas lokal dapat membuka jalan menuju struktur fiskal yang lebih inklusif.

Secara akademik, hasil penelitian ini membuka peluang bagi studi lanjutan yang lebih komprehensif. Penelitian di masa depan sebaiknya mempertimbangkan untuk memasukkan variabel kontrol tambahan seperti tingkat kemiskinan, jumlah UMKM formal, indeks pembangunan manusia, atau bahkan struktur belanja pemerintah daerah. Selain itu, pendekatan spasial atau multilevel juga dapat digunakan untuk menangkap dimensi ketimpangan yang bersifat hierarkis maupun geografis. Dengan demikian, hasil ini tidak hanya memberi kontribusi terhadap pengujian hipotesis empiris, tetapi juga memberi arah baru dalam penyusunan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) yang lebih tepat sasaran dan kontekstual terhadap kebutuhan daerah.

## KESIMPULAN

Dengan demikian, *Revenue Statistics in Asia and the Pacific* dari OECD menjadi kerangka komparatif dan indikator makro yang relevan untuk memperkuat argumen teoritis dan empiris mengenai korelasi antara *tax ratio* dan ketimpangan pendapatan regional di Indonesia. Laporan ini menegaskan bahwa efektivitas sistem perpajakan bukan hanya soal rasio dan total penerimaan, tetapi juga soal sensitivitasnya terhadap pertumbuhan dan penyebaran ekonomi di wilayah yang beragam, sebuah isu sentral dalam pengelolaan fiskal Indonesia yang berorientasi pada keadilan (OECD, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat kuat dan signifikan antara *tax ratio* dan *Gini ratio* di tingkat provinsi di Indonesia selama periode 2020–2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kontribusi pajak terhadap PDRB suatu provinsi, maka semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Hasil ini memperkuat argumentasi teoritis bahwa sistem perpajakan yang efektif dan progresif dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata dan adil di tingkat regional (Syawaluddin & Safitri, 2021)

Implikasi dari temuan ini mendukung perlunya reformasi perpajakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada aspek keadilan fiskal antarwilayah. Provinsi dengan *tax ratio* rendah dan ketimpangan tinggi perlu menjadi prioritas dalam pembenahan sistem pajak daerah (Setiawan, 2015). Untuk pengembangan penelitian ke depan, disarankan untuk menambahkan variabel kontrol seperti tingkat kemiskinan, struktur sektor informal, atau indeks pembangunan manusia, serta mempertimbangkan pendekatan spasial atau multilevel guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap determinan ketimpangan pendapatan antarwilayah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2024). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025). *Kajian Fiskal Regional (KFR)*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/kajian-fiskal-regional-kfr.html>
- Ghozali, I. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. [https://www.researchgate.net/publication/301199668\\_Aplikasi\\_Analisis\\_Multivariate\\_SPSS\\_23](https://www.researchgate.net/publication/301199668_Aplikasi_Analisis_Multivariate_SPSS_23)
- Hesty Aisyah, M. Dahniel Dahlan, & Mira Aprila. (2023). Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif Dari Indonesia. *JURNAL ECONOMINA*, 2(12), 3722–3736. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1065>
- Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP\\_RKP/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024\\_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf)
- Musgrave, R., & Musgrave, P. (1989). *Public Finance In Theory and Practice (5th Edition)* (5th ed.). McGraw-Hill Book Co. [https://desmarais-tremblay.com/Resources/Musgrave%20Richard%20A.%20and%20Musgrave%20Peggy%20B.%201989%20281973%29%20Public%20Finance%20in%20Theory%20and%20Practice\\_5th%20ed.pdf](https://desmarais-tremblay.com/Resources/Musgrave%20Richard%20A.%20and%20Musgrave%20Peggy%20B.%201989%20281973%29%20Public%20Finance%20in%20Theory%20and%20Practice_5th%20ed.pdf)
- Nurfadila, M. R., & Intan, P. K. (2023). Identifikasi Faktor-Faktor Pengaruh Indeks Gini Ratio Menggunakan Regresi Logistik Ordinal. *Jurnal Ilmiah Matematika Dan Terapan* 20(1):38-46, 20(1), 38–46. <https://doi.org/10.22487/2540766X.2023.v20.i1.16258>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024: Tax Revenue Buoyancy in Asia*. OECD Publishing Paris. <https://doi.org/10.1787/e4681bfa-en>
- Pattimau, A. (2024). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Strategi Pembangunan Kota Kupang: Tinjauan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah (DEFIS)*, 14. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?portfolio=jurnal-defis-edisi-14>
- Setiawan, L. (2015). *Perbandingan Komponen dan Struktur Pajak OECD dan Government Finance Statistic Manual dan Pengaruhnya atas Pendefinisian Tax ratio di Indonesia*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perbandingan-komponen-dan-struktur-pajak-oecd-dan-government-finance-statistic-manual-dan-pengaruhnya-atas-pendefinisiantax-ratio-di-indonesia>
- Situmorang, E. R., Alisyah, L. O., & Calvin. (2025). Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2021. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(3), 3483–3498. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i3.58165>
- Susilo, J. H., Anam, M. S., & Alfiyana, S. (2023). Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan Pendekatan Data Panel Dinamis Tahun 2012-2021. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(2), 312–321. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i2.1024>

- Syawaluddin, & Safitri, R. (2021). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jeksyah : Islamic Economics Journal*, 1(1), 16–26. <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v1i1.6>
- Tanzi, V. (2000). Tax Policy for Emerging Markets Developing Countries. *IMF Working Paper*, 2(035), 34. <https://doi.org/10.5089/9781451845341.001>
- Zucman, G. (2015). *The Hidden Wealth of Nations : The Scourge of Tax Havens*. The University Of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/H/bo20159822.html>